EFEKTIVITAS PETUGAS REGISTRASI GAMPONG DALAM PENERBITAN AKTA KEMATIAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ACEH TAMIANG PROVINSI ACEH

Fajar Variq Al Khani
NPP. 32.0011

*Asdaf Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh
Program Studi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil*

Email: fajarvariq@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Ir. I Gede Suratha, M.MA.

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): The low level of death certificate registration in Aceh Tamiang Regency. **Purpose:** This study aims to examine the effectiveness of PRG in issuing death certificates in Karang Baru District, Aceh Tamiang Regency. **Method:** This research employed a qualitative approach, using data collection techniques such as interviews and document analysis involving key stakeholders including the Civil Registry Office, partner institutions, and users of the service. **Results/Findings:** The study applied a descriptive qualitative method with an inductive approach, referring to Duncan's effectiveness theory in Steers, which includes three dimensions: goal achievement, integration, and adaptation. The results show that in 2020, PRG in Karang Baru contributed to the issuance of 248 out of a total of 2,116 death certificates in Aceh Tamiang, accounting for approximately 11.7%. This indicates a significant role of PRG. However, several challenges remain, such as low public awareness, limited technological infrastructure, and uneven human resource capacity. **Conclusion:** In conclusion, PRG plays a vital role in improving civil registration services, particularly in death certificate issuance. Optimizing PRG's role requires consistent training, infrastructure enhancement, and ongoing public education.

Keywords: Aceh Tamiang, civil registration, death certificate, effectiveness, Gampong Registration Officer, public service.

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Masih rendahnya Tingkat pencatatan akta kematian di Kabupaten Aceh Tamiang. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas PRG dalam penerbitan akta kematian di Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang. **Metode:** Menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan analisis dokumen terhadap pihak-pihak terkait, termasuk Dinas Dukcapil, mitra kerja sama, dan masyarakat pengguna KIA. **Hasil/Temuan:** Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif, mengacu pada teori efektivitas Duncan dalam Steers yang mencakup tiga dimensi: pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2020, PRG di Kecamatan Karang Baru berkontribusi terhadap penerbitan 248 dari total

2.116 akta kematian di Kabupaten Aceh Tamiang atau sekitar 11,7%. Hal ini menunjukkan peran PRG cukup signifikan. Namun, masih terdapat kendala seperti rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan infrastruktur teknologi, dan kapasitas SDM yang belum merata.

Kesimpulan: Kesimpulannya, PRG memiliki peran penting dalam meningkatkan layanan administrasi kependudukan, khususnya dalam penerbitan akta kematian. Optimalisasi peran PRG perlu didukung dengan pelatihan, peningkatan fasilitas, dan sosialisasi berkelanjutan kepada masyarakat.

Kata kunci: Aceh Tamiang, pencatatan sipil, akta kematian, efektivitas, Petugas Pendaftaran Gampong, pelayanan publik.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pencatatan peristiwa kematian melalui penerbitan akta kematian merupakan bagian penting dari sistem administrasi kependudukan yang menjamin pengakuan keberadaan penduduk oleh negara serta menjadi dasar dalam perumusan kebijakan publik dan penyaluran bantuan sosial secara tepat sasaran. Di Provinsi Aceh, pencatatan kematian menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya cakupan pelaporan yang hanya mencapai 22% pada tahun 2021, jauh di bawah target Sustainable Development Goals sebesar 80% pada tahun 2030. Salah satu strategi yang digunakan untuk mengatasi masalah ini adalah dengan memanfaatkan Petugas Registrasi Gampong (PRG) sebagai ujung tombak pencatatan sipil di tingkat desa. Melalui dasar hukum seperti Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Gubernur Aceh, PRG ditugaskan untuk menjembatani masyarakat dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam proses pelaporan peristiwa kematian. Namun, implementasi sistem ini masih dihadapkan pada kendala seperti keterbatasan infrastruktur, variasi tingkat kesadaran masyarakat, kualitas sumber daya manusia, dan hambatan sosial budaya. Dalam praktik pelayanan kependudukan di daerah lain, digitalisasi layanan terbukti dapat meningkatkan efektivitas dan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan administrasi, sebagaimana terlihat dalam penerapan layanan KIA online di Kota Semarang yang memperpendek waktu pelayanan dan meminimalkan tatap muka (Sururama & Permana, 2021). Selain itu, keberhasilan administrasi kependudukan sangat ditentukan oleh strategi implementasi sistem informasi yang terintegrasi dan didukung oleh kapasitas teknis aparat di lapangan (Ripa'i, 2018). Sebagaimana ditegaskan oleh Prof. Dr. H. Hadi Prabowo, M.M., bahwa birokrasi pemerintahan di era saat ini dituntut untuk adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dengan mengedepankan efisiensi, transparansi, serta pelayanan berbasis teknologi informasi sebagai bagian dari reformasi birokrasi digital. Di Kabupaten Aceh Tamiang, khususnya Kecamatan Karang Baru sebagai pusat administrasi, PRG telah mulai

menunjukkan kontribusi terhadap peningkatan jumlah pencatatan kematian sejak tahun 2019, namun efektivitasnya masih perlu dievaluasi secara komprehensif guna memastikan akurasi dan kelengkapan data kependudukan. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada analisis efektivitas petugas registrasi gampong dalam penerbitan akta kematian di Kabupaten Aceh Tamiang sebagai upaya mendukung tata kelola administrasi kependudukan yang lebih baik dan inklusif.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Meskipun terdapat beberapa penelitian terkait administrasi kependudukan dan penerbitan dokumen kependudukan, khususnya akta kematian, masih terdapat kesenjangan dalam kajian yang menitikberatkan pada efektivitas Petugas Registrasi Gampong (PRG) di tingkat desa, terutama di Kabupaten Aceh Tamiang. Kesenjangan ini terlihat dari minimnya penelitian yang mengkaji secara komprehensif faktor-faktor penghambat yang dihadapi PRG dalam melaksanakan tugas penerbitan akta kematian serta upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat untuk mengatasi hambatan tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan memberikan gambaran yang lebih jelas dan detail mengenai permasalahan yang dihadapi PRG serta strategi penanganannya, sehingga dapat menjadi acuan dalam meningkatkan efektivitas layanan administrasi kependudukan di tingkat gampong.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai efektivitas petugas registrasi gampong dalam penerbitan akta kematian telah banyak dilakukan, baik pada tingkat nasional maupun internasional, dengan fokus yang bervariasi mulai dari evaluasi kinerja hingga tantangan implementatif di lapangan. Nurul Husnina (2022) dalam penelitiannya yang dilakukan di Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar, menyoroti bahwa keberadaan petugas registrasi di tingkat gampong telah berjalan sesuai dengan prosedur, namun masih dihadapkan pada berbagai tantangan teknis dan kultural, termasuk rendahnya partisipasi masyarakat serta kurangnya fasilitas penunjang di lapangan. Sementara itu, penelitian oleh Rahma Dewi, Ikhsan, dan Zuhrizal Fadhly (2023) mengevaluasi kinerja Petugas Registrasi Gampong (PRG) dalam pengurusan akta kelahiran dan kematian di Kabupaten Aceh Barat. Hasilnya menunjukkan perlunya edukasi dan peningkatan kapasitas petugas dalam mengatasi hambatan administratif, serta pentingnya dukungan dari pemerintah desa dalam menunjang kinerja PRG.

Penelitian lain oleh Niza Rika Dwi Inka Sari & Merinawati (2023) mengulas inovasi pelayanan “Si Jaran Ijo” di Kabupaten Blitar, yang berhasil meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan melalui pendekatan jemput bola. Temuan ini relevan dengan konteks PRG yang diharapkan mampu menjangkau masyarakat desa secara langsung. Dari kalangan civitas IPDN, jurnal yang diterbitkan oleh Syahrial dan Lestari (2021) berjudul “*Evaluasi Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan Berbasis Desa di Kabupaten Garut*” menekankan bahwa pelibatan aparat desa dalam pengelolaan adminduk dapat meningkatkan keakuratan data kependudukan serta mempercepat proses pencatatan peristiwa penting, termasuk kematian. Selain itu, Wahyudi dan Permana (2020) dalam jurnal IPDN lainnya menyatakan bahwa keberhasilan program PRG sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah daerah dan perangkat desa, serta kepemimpinan kepala desa dalam mendorong budaya tertib administrasi.

Dari kajian internasional, penelitian oleh Leon et al. (2020) yang dipublikasikan dalam *BMC Public Health* menunjukkan bahwa sistem desentralisasi pencatatan kematian di beberapa negara berkembang mampu meningkatkan cakupan pencatatan kematian, terutama di wilayah rural, apabila didukung oleh pelatihan yang baik serta integrasi sistem informasi yang memadai. Kemudian, studi oleh Setel et al. (2007) dalam *The Lancet* menyoroti pentingnya *verbal autopsy* dan pelatihan petugas pencatat dalam memastikan akurasi data kematian di negara-negara dengan sistem registrasi vital yang belum optimal. Terakhir, kerja dari Abouzahr et al. (2015) dalam jurnal *Global Health Action* menekankan bahwa kualitas registrasi kematian sangat terkait dengan kapasitas lokal dan penguatan kelembagaan di tingkat desa atau komunitas lokal.

Dengan mengacu pada temuan-temuan tersebut, maka penelitian ini mencoba untuk melengkapi kekosongan studi dengan memfokuskan pada efektivitas PRG secara lebih sistematis, khususnya dalam konteks penerbitan akta kematian di Kabupaten Aceh Tamiang, dengan memperhatikan indikator-indikator seperti capaian target, koordinasi antarinstansi, dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan kebijakan maupun teknologi.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini menghadirkan kebaruan ilmiah dengan fokus pada efektivitas petugas registrasi gampong dalam penerbitan akta kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tamiang, yang masih jarang dikaji secara mendalam dalam konteks pemerintahan daerah tingkat gampong. Kebaruan penelitian ini terletak pada penyajian data dan informasi empiris yang spesifik mengenai peran dan tantangan petugas registrasi di tingkat desa, sehingga hasilnya tidak hanya memperkaya khazanah ilmu administrasi kependudukan, tetapi juga memberikan pedoman praktis bagi pengembangan kapasitas petugas dan kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas layanan publik. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan teori efektivitas pelayanan publik di tingkat desa, tetapi juga memberikan rekomendasi konkret untuk perbaikan kinerja administrasi kependudukan di Kabupaten Aceh Tamiang.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas Petugas Registrasi Gampong (PRG) dalam penerbitan akta kematian di Kabupaten Aceh Tamiang, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan tugas tersebut. Selain itu, penelitian ini juga ingin mengetahui upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tamiang dalam mengatasi hambatan yang dihadapi oleh PRG selama proses penerbitan akta kematian, sehingga dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai tantangan dan solusi yang ada dalam rangka meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan di tingkat gampong.

II. METODE

Berdasarkan pendekatannya penelitian terbagi menjadi penelitian kuantitatif, penelitian kualitatif, dan penelitian perkembangan (Arsyam & M. Yusuf Tahir, 2021). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggambarkan secara mendalam

dan sistematis mengenai efektivitas Petugas Registrasi Gampong (PRG) dalam penerbitan akta kematian di Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang. Pendekatan kualitatif dinilai tepat untuk mengeksplorasi fenomena sosial dan dinamika di lapangan yang tidak dapat diukur secara kuantitatif, serta untuk memahami proses dan interaksi antar-aktor dalam pelaksanaan administrasi kependudukan. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Informan dalam penelitian ini dipilih secara purposive dan snowball sampling, terdiri dari 20 orang yang meliputi Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi di Dinas Dukcapil, penanggung jawab PRG, lima orang PRG, serta sepuluh orang warga dari lima gampong di Kecamatan Karang Baru. Informan ini dipilih karena memiliki pengalaman langsung atau keterlibatan dalam proses penerbitan akta kematian. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, dengan waktu penelitian pada tahun 2024 sesuai dengan kebutuhan studi kasus dan konteks implementasi kebijakan lokal di bidang administrasi kependudukan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Efektivitas Petugas Registrasi Gampong dalam Penerbitan Akta Kematian

Penelitian ini menganalisis efektivitas Petugas Registrasi Gampong (PRG) dalam penerbitan akta kematian di Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, menggunakan teori efektivitas Duncan dalam Steers (2020:53), yang mencakup tiga dimensi: pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Inisiatif PRG mulai diimplementasikan sejak Agustus 2020 sebagai respons terhadap pandemi COVID-19, bertujuan untuk mempercepat layanan pencatatan dokumen kependudukan di tingkat desa. Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2013 dan Permendagri No. 119 Tahun 2017, PRG membantu kepala desa dan Disdukcapil dalam pencatatan sipil. Salah satu inovasi yang mendukung efektivitas PRG adalah peluncuran aplikasi *Kios Tersipu*, yang memungkinkan PRG mengakses sistem pencatatan secara digital dari desa. Namun, implementasi aplikasi ini masih terkendala fasilitas dan kemampuan teknis petugas. Wawancara dengan Kepala Disdukcapil dan Kabid Informasi menunjukkan bahwa keberadaan PRG mempermudah masyarakat, terutama yang tinggal jauh dari kantor Disdukcapil, dalam mengurus akta kematian. Tingginya jumlah kasus kematian di Kecamatan Karang Baru menjadi alasan wilayah ini dipilih sebagai lokasi studi, dengan pencapaian penerbitan akta kematian sebanyak 248 akta pada tahun 2024, tertinggi di Aceh Tamiang. Hal ini mencerminkan efektivitas PRG, meskipun masih terdapat tantangan dalam aspek adaptasi teknologi dan penyediaan sarana pendukung.

3.1.1 Pencapaian Tujuan

Efektivitas PRG dalam pencapaian tujuan diukur melalui tiga indikator: jumlah akta kematian yang diterbitkan, kesesuaian waktu penerbitan, dan tingkat keberhasilan. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2024, sebanyak 248 akta kematian diterbitkan, meningkat hampir 50% dibanding sebelum adanya PRG. Kehadiran PRG memudahkan masyarakat, karena mereka cukup melapor ke kantor desa tanpa harus ke Disdukcapil. Dari segi waktu, penerbitan akta kini rata-rata hanya memakan waktu 1–2 hari kerja setelah berkas lengkap, lebih cepat dari sebelumnya yang mencapai 5–7 hari. Kecepatan ini didukung oleh sistem verifikasi dokumen oleh PRG yang langsung terhubung ke Disdukcapil. Sementara itu, tingkat keberhasilan penerbitan akta mencapai 89,9%, dengan 248 akta dari 276 kasus

kematian. Meski masih ada kendala seperti kurangnya pemahaman masyarakat dan keterbatasan koordinasi, keberadaan PRG secara umum meningkatkan kesadaran masyarakat dan mempercepat layanan pencatatan kematian.

3.1.2 Integrasi

Dimensi integrasi dalam efektivitas Petugas Registrasi Gampong (PRG) dalam penerbitan akta kematian di Kecamatan Karang Baru tercermin dari koordinasi dan komunikasi yang solid antara PRG dengan berbagai pihak terkait. Koordinasi antara PRG dan Disdukcapil berjalan baik, didukung oleh pertemuan mingguan dan grup WhatsApp untuk menyampaikan kebijakan baru serta menyelesaikan kendala teknis, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Mukhlis, S.Sos dan dikonfirmasi oleh PRG Bapak Ahmad Syahputra yang menyebut respons Disdukcapil sangat cepat. Selain itu, PRG juga aktif berkoordinasi antar sesama, seperti dijelaskan oleh Ibu Nurhasanah dari Desa Lalang yang mengungkapkan adanya forum diskusi bulanan antar PRG untuk berbagi pengalaman. Di tingkat masyarakat, PRG seperti Bapak Teuku Irfan dari Desa Medang Ara bersikap proaktif dengan segera mendatangi keluarga almarhum berdasarkan informasi dari tokoh masyarakat, guna memandu proses pengurusan akta. Dalam aspek komunikasi, PRG dinilai komunikatif dan mampu menjelaskan prosedur dengan bahasa sederhana sebagaimana disampaikan oleh Bapak Abdul Razak dari Desa Lalang. Keterbukaan informasi juga terwujud melalui pemasangan banner prosedur di kantor gampong dan sosialisasi aktif oleh PRG, sebagaimana dijelaskan oleh Keuchik Desa Johar, Bapak Teuku Zulkarnain. Kemudahan akses informasi turut didukung oleh penyediaan nomor kontak PRG yang terpasang di papan pengumuman, sebagaimana disampaikan oleh Ibu Maryam dari Desa Air Tenang, yang merasa sangat terbantu dalam memperoleh informasi dan layanan dari PRG.

3.1.3 Adaptasi

Dimensi adaptasi dalam efektivitas Petugas Registrasi Gampong (PRG) di Kecamatan Karang Baru terlihat dari kemampuan mereka dalam meningkatkan kompetensi dan menyesuaikan program layanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta perkembangan kebijakan dan teknologi. Dalam aspek peningkatan kemampuan, PRG telah menjalani pelatihan intensif selama satu minggu sebelum bertugas dan mendapatkan pelatihan penyegaran setiap tiga bulan, sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Mukhlis, S.Sos, yang memastikan pemahaman PRG terhadap prosedur dan persyaratan pengurusan akta kematian tetap mutakhir. Sebagian besar PRG juga dinilai telah memahami dengan baik tugas mereka dan mampu memberikan pelayanan yang tepat. Dalam hal penggunaan teknologi, menurut Bapak Arjuna, S.Kom, sekitar 70% PRG telah mahir menggunakan aplikasi Kios Tersipu, meskipun 30% lainnya masih memerlukan pendampingan, terutama di wilayah terpencil. Ibu Nurhasanah dari Desa Lalang menuturkan bahwa kendati awalnya kesulitan, ia kini mulai terbiasa menggunakan aplikasi tersebut berkat pelatihan dari Disdukcapil. PRG juga responsif terhadap perubahan kebijakan; Bapak Ahmad Syahputra dari Desa Air Tenang menyatakan bahwa informasi kebijakan baru selalu disampaikan melalui grup WhatsApp dan dokumen tertulis yang mempermudah penyesuaian. Pada aspek penyesuaian program, PRG menunjukkan fleksibilitas dalam pelayanan, seperti dijelaskan oleh Bapak Teuku Irfan dari Desa Medang Ara yang melakukan jemput bola untuk warga lanjut usia atau tidak mampu. Mereka juga mampu mengatasi kendala di

lapangan, seperti dokumen hilang atau rusak, dengan berkoordinasi bersama Disdukcapil untuk verifikasi data dan membantu pengurusan dokumen pengganti, sebagaimana dijelaskan oleh Ibu Fatimah dari Desa Johar. Selain itu, PRG juga melakukan inovasi dalam pelayanan; Bapak Ahmad Syahputra, misalnya, menggandeng tokoh agama dan ketua dusun untuk sosialisasi setelah shalat Jumat atau acara kenduri serta membagikan brosur informatif di tempat-tempat umum.

3.2 Faktor Penghambat Petugas Registrasi Gampong Dalam Penerbitan Akta Kematian

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa faktor yang menghambat efektivitas Petugas Registrasi Gampong dalam penerbitan akta kematian di Kabupaten Aceh Tamiang. Faktor-faktor penghambat tersebut dapat dikategorikan menjadi beberapa aspek sebagai berikut:

3.2.1 Keterbatasan Infrastruktur Teknologi

Salah satu faktor penghambat signifikan dalam efektivitas kinerja PRG di Kecamatan Karang Baru adalah keterbatasan infrastruktur teknologi, terutama di daerah pelosok. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, Arjuna, S.Kom, menyampaikan bahwa jaringan internet yang tidak stabil di beberapa gampong menyebabkan proses sinkronisasi data sering terhambat, dan tidak semua kantor gampong memiliki perangkat komputer yang memadai untuk mengoperasikan aplikasi Kios Tersipu secara optimal. Kondisi ini diperkuat oleh pernyataan Bapak Sulaiman, PRG Desa Tanjung Seumantoh, yang mengungkapkan bahwa untuk mengunggah dokumen ke server Disdukcapil, mereka kerap harus menunggu berjam-jam karena lemahnya jaringan, bahkan terkadang harus pergi ke kantor kecamatan atau langsung ke Disdukcapil hanya untuk mendapatkan akses internet yang memadai, sehingga proses penerbitan akta kematian menjadi lambat dan tidak efisien.

3.2.2 Kesadaran Masyarakat

Keterbatasan jumlah dan kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu faktor utama yang menghambat pelaksanaan tugas Petugas Registrasi Gampong (PRG) di Kecamatan Karang Baru. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Ibu Astrid Meliana, S.AP., M.M., pada tanggal 7 Januari 2025, diketahui bahwa idealnya setiap gampong memiliki minimal dua orang PRG agar pelayanan tetap berjalan meskipun salah satu petugas berhalangan. Namun, kenyataannya saat ini hanya 10 dari 31 gampong yang memiliki dua PRG, sedangkan sisanya hanya memiliki satu orang PRG. Keterbatasan anggaran disebut sebagai kendala utama dalam upaya penambahan jumlah petugas. Selain jumlah yang terbatas, kualitas atau latar belakang pendidikan PRG juga menjadi perhatian serius. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, Bapak Mukhlis, S.Sos., menyampaikan bahwa sebagian besar PRG di Kecamatan Karang Baru merupakan lulusan SMA atau sederajat, dan hanya sekitar 30% yang memiliki pendidikan formal di tingkat D3 atau S1. Kondisi ini kerap menjadi kendala, terutama ketika petugas dihadapkan pada pemahaman terhadap peraturan dan kebijakan yang kompleks, serta kesulitan dalam mengoperasikan sistem atau aplikasi pelayanan berbasis teknologi informasi.

3.2.3 Kendala Geografis

Kondisi geografis yang menantang di beberapa wilayah Kabupaten Aceh Tamiang, khususnya di daerah pelosok, turut menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas PRG. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Ir. Adi Darma, M.Si, menjelaskan bahwa akses jalan yang sulit dan jarak antar pemukiman yang berjauhan, terutama saat musim hujan, menyulitkan petugas dalam menjangkau seluruh masyarakat. Pernyataan ini diperkuat oleh Bapak Sulaiman, PRG Desa Tanjung Seumantoh, yang menyampaikan bahwa di desanya terdapat beberapa dusun terpencil dengan akses jalan yang buruk, sehingga menyulitkan proses sosialisasi dan verifikasi dokumen langsung ke tempat tinggal warga. Tantangan geografis ini secara langsung memengaruhi efektivitas pelayanan pencatatan kematian oleh PRG.

3.2.4 Keterbatasan Anggaran

Keterbatasan anggaran juga menjadi faktor signifikan yang menghambat optimalisasi peran Petugas Registrasi Gampong (PRG). Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Ibu Astrid Meliana, S.AP., M.M., diketahui bahwa anggaran yang dialokasikan untuk program PRG masih sangat terbatas. Saat ini, honorarium yang diterima oleh PRG hanya sebesar Rp1.200.000 per bulan, jumlah yang jauh di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP) Aceh. Kondisi ini berdampak pada rendahnya motivasi kerja PRG dalam melaksanakan tugasnya secara optimal. Selain honorarium, keterbatasan anggaran juga terlihat pada aspek pengadaan sarana dan prasarana, seperti komputer dan jaringan internet yang memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas di tingkat gampong. Keluhan serupa disampaikan oleh Petugas Registrasi Gampong Desa Lalang, Ibu Nurhasanah, yang mengakui bahwa dengan honor yang diterima saat ini, ia harus mencari pekerjaan sampingan guna mencukupi kebutuhan keluarga, sehingga tidak dapat fokus sepenuhnya menjalankan tugas sebagai PRG. Bahkan, dalam beberapa kegiatan seperti koordinasi ke Disdukcapil atau mengikuti pelatihan, PRG seringkali menggunakan dana pribadi, termasuk untuk biaya transportasi. Situasi ini mencerminkan perlunya perhatian lebih dari pemerintah daerah terhadap aspek pembiayaan program PRG agar pelaksanaan administrasi kependudukan di tingkat gampong dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

3.3 Upaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Mengatasi Hambatan

Dalam menghadapi berbagai hambatan yang dihadapi Petugas Registrasi Gampong dalam penerbitan akta kematian, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tamiang telah melakukan beberapa upaya sebagai berikut:

3.3.1 Peningkatan Infrastruktur Teknologi

Untuk mengatasi keterbatasan sumber daya manusia, Disdukcapil Kabupaten Aceh Tamiang telah melaksanakan berbagai program peningkatan kapasitas bagi PRG. Sekretaris Disdukcapil, Ibu Astrid Meliana, S.AP, MM, menjelaskan bahwa pada tahun 2024 telah dilakukan empat kali pelatihan yang mencakup pemahaman regulasi, prosedur administrasi kependudukan, hingga penguasaan teknologi informasi. Selain itu, Disdukcapil juga menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi untuk program magang mahasiswa guna membantu PRG di gampong dengan beban kerja tinggi. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, Bapak Mukhlis, S.Sos, menambahkan bahwa sistem mentoring

diterapkan untuk membina PRG junior oleh PRG senior yang berpengalaman, dengan masing-masing mentor membimbing 3–4 PRG. Sistem ini didukung oleh modul pelatihan dan video tutorial penggunaan aplikasi Kios Tersipu yang dapat diakses kapan saja. Program-program ini mendapat respons positif dari PRG, seperti disampaikan oleh Ibu Nurhasanah dari Desa Lalang yang merasa lebih percaya diri setelah pelatihan dan terbantu dengan sistem mentoring. Hal senada disampaikan oleh Bapak Ahmad Syahputra dari Desa Air Tenang, yang merasa terbantu dengan keberadaan video tutorial dan grup WhatsApp sebagai media diskusi dan berbagi solusi antar PRG.

3.3.2 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Untuk mengatasi keterbatasan sumber daya manusia, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Aceh Tamiang telah menjalankan berbagai program peningkatan kapasitas yang dirancang untuk memperkuat kompetensi Petugas Registrasi Gampong (PRG). Dalam wawancara pada tanggal 7 Januari 2025, Sekretaris Disdukcapil, Ibu Astrid Meliana, S.AP., M.M., menjelaskan bahwa pihaknya secara rutin mengadakan pelatihan dan bimbingan teknis yang menjangkau seluruh PRG di wilayah kabupaten. Selama tahun 2024, telah diselenggarakan empat kali pelatihan yang mencakup materi pemahaman terhadap regulasi terbaru, prosedur pengurusan dokumen kependudukan, serta pelatihan penguasaan teknologi informasi. Selain itu, Disdukcapil juga menjalin kerja sama dengan beberapa perguruan tinggi di Aceh untuk program magang mahasiswa pada bidang kependudukan dan pencatatan sipil, yang turut membantu meringankan beban kerja PRG, terutama di gampong dengan tingkat permintaan layanan yang tinggi. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, Bapak Mukhlis, S.Sos., menambahkan pada wawancara tanggal 8 Januari 2025 bahwa Disdukcapil telah menerapkan sistem mentoring, di mana PRG senior yang berpengalaman menjadi mentor bagi 3–4 PRG junior. Sistem ini dinilai efektif dalam meningkatkan pemahaman prosedural serta keterampilan penggunaan aplikasi layanan kependudukan. Untuk mendukung proses belajar, telah disusun modul pelatihan yang komprehensif dan dilengkapi video tutorial penggunaan aplikasi *Kios Tersipu* yang dapat diakses kapan saja oleh PRG. Hasil wawancara dengan beberapa PRG menunjukkan respons positif terhadap program ini. Ibu Nurhasanah, PRG dari Desa Lalang, menyatakan bahwa pelatihan dan modul yang diberikan membantunya memahami prosedur yang sebelumnya dirasa kompleks, dan sistem mentoring memudahkan konsultasi saat menghadapi kendala di lapangan. Hal senada disampaikan oleh Bapak Ahmad Syahputra, PRG Desa Air Tenang, yang merasakan manfaat besar dari video tutorial karena dapat diputar ulang sesuai kebutuhan, serta dari adanya grup WhatsApp khusus PRG yang memungkinkan pertukaran pengalaman dan solusi secara cepat dan fleksibel. Program-program ini menunjukkan bahwa dengan pendekatan pelatihan yang berkelanjutan dan dukungan teknologi, kualitas SDM PRG dapat terus ditingkatkan secara sistematis.

3.3.3 Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya akta kematian, Disdukcapil Kabupaten Aceh Tamiang telah menjalankan berbagai program sosialisasi dan edukasi. Kepala Dinas, Ir. ADI DARMA, M.Si, menjelaskan bahwa sepanjang tahun 2024 telah dilakukan 24 kegiatan sosialisasi di seluruh kecamatan, yang melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat. Disdukcapil juga memanfaatkan media lokal—

seperti radio, koran daerah, dan media sosial—serta menyebarkan brosur dan poster informatif ke seluruh gampong. Kepala Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan, dan Kematian, Bapak Rahman, S.Sos, menambahkan bahwa materi sosialisasi disusun secara komprehensif namun mudah dipahami. Materi tersebut menjelaskan manfaat akta kematian, prosedur pengurusan, serta dokumen yang diperlukan. Penekanan juga diberikan bahwa pengurusan akta kematian bersifat gratis, guna menghilangkan persepsi bahwa pengurusan dokumen kependudukan mahal. Pendekatan religius turut digunakan, dengan melibatkan tokoh agama untuk menyampaikan pentingnya pencatatan peristiwa kematian dari perspektif keagamaan.

Hasil observasi menunjukkan bahwa program sosialisasi ini cukup efektif. Bapak Teuku Zulkarnain, Keuchik Desa Johar, menyampaikan bahwa kesadaran masyarakat di desanya meningkat signifikan—yang sebelumnya tidak tertarik mengurus akta kematian, kini hampir setiap peristiwa kematian langsung dilaporkan. Hal ini juga didukung oleh peran aktif PRG dalam memberikan edukasi dan bantuan pengurusan. Pernyataan serupa disampaikan oleh Ibu Maryam, warga Desa Air Tenang, yang mengaku baru memahami pentingnya akta kematian setelah mengikuti sosialisasi. Ia merasa terbantu oleh PRG yang menjelaskan bahwa proses pengurusan ternyata sederhana dan tidak rumit.

3.3.4 Inovasi Layanan

Untuk mengatasi kendala geografis dan memperluas jangkauan layanan administrasi kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Aceh Tamiang telah mengembangkan berbagai inovasi layanan yang bersifat proaktif dan berbasis pendekatan langsung kepada masyarakat. Dalam wawancara pada tanggal 7 Januari 2025, Kepala Dinas, Ir. Adi Darma, M.Si., menjelaskan bahwa salah satu inovasi unggulan adalah *SIDALING* (Sistem Daring Pelayanan Keliling), yaitu program di mana petugas Disdukcapil bersama Petugas Registrasi Gampong (PRG) secara berkala melakukan kunjungan ke daerah-daerah terpencil untuk memberikan pelayanan langsung, termasuk pengurusan akta kematian. Selain itu, diluncurkan pula layanan *PRG Mobile*, di mana PRG secara aktif mendatangi rumah warga yang baru mengalami peristiwa kematian untuk membantu proses administrasi pencatatan. Layanan ini sangat bermanfaat, terutama bagi keluarga yang sedang berduka dan enggan meninggalkan rumah. Menurut Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, Bapak Mukhlis, S.Sos., pada wawancara tanggal 8 Januari 2025, Disdukcapil juga telah mengembangkan sistem notifikasi otomatis yang terintegrasi dengan aplikasi *Kios Tersipu*. Sistem ini memungkinkan PRG mendapatkan notifikasi langsung apabila ada laporan kematian dari fasilitas kesehatan, sehingga PRG dapat segera menghubungi keluarga almarhum untuk memfasilitasi penerbitan akta kematian. Inovasi ini terbukti efektif meningkatkan cakupan pencatatan kematian, khususnya bagi keluarga yang belum memahami prosedur atau pentingnya pelaporan. Respons masyarakat terhadap berbagai inovasi layanan ini sangat positif. Bapak Abdul Razak, warga Desa Lalang, menyampaikan bahwa ketika ibunya meninggal dunia, PRG setempat langsung datang ke rumah, menyampaikan belasungkawa, dan membantu seluruh proses pengurusan akta kematian tanpa perlu keluarga datang ke kantor gampong atau Disdukcapil. Hal serupa juga dirasakan oleh Bapak Ismail dari Desa Kebun Tanjung Seumantoh, yang mengungkapkan bahwa program *SIDALING* sangat membantu masyarakat di wilayah pelosok, karena sebelumnya mereka harus menempuh jarak yang jauh dan mengeluarkan biaya besar untuk mengakses layanan kependudukan. Kini, dengan

adanya layanan keliling secara berkala, seluruh proses menjadi lebih mudah, efisien, dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

3.3.5 Penguatan Koordianasi Antar Lembaga

Disdukcapil Kabupaten Aceh Tamiang telah memperkuat koordinasi lintas lembaga untuk mengoptimalkan pencatatan peristiwa kematian. Sekretaris Dinas, Ibu Astrid Meliana, S.AP, MM, menjelaskan bahwa kerja sama telah terjalin dengan berbagai instansi seperti Dinas Kesehatan, rumah sakit, puskesmas, dan kepolisian. Kesepakatan dengan rumah sakit dan puskesmas mengharuskan mereka melaporkan setiap kematian yang terjadi di fasilitas mereka kepada Disdukcapil dan PRG di gampong tempat tinggal almarhum. Kepolisian juga berkoordinasi untuk melaporkan kasus kematian tidak wajar atau kecelakaan, sehingga memastikan semua peristiwa kematian tercatat dan akta kematian dapat diterbitkan. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, Arjuna, S.Kom, menambahkan bahwa Disdukcapil telah mengembangkan sistem informasi terintegrasi yang menghubungkan Disdukcapil dengan instansi terkait. Sistem ini memungkinkan pertukaran data kematian secara real-time antara rumah sakit, puskesmas, kepolisian, dan Disdukcapil, yang kemudian didistribusikan kepada PRG untuk ditindaklanjuti. Sistem ini meningkatkan akurasi dan kelengkapan data kematian di Kabupaten Aceh Tamiang. Dukungan dari lembaga terkait juga positif. Dr. Zulfikar, Kepala Puskesmas Karang Baru, menyatakan bahwa mereka memiliki koordinasi yang baik dengan Disdukcapil dan PRG, selalu membuat surat keterangan kematian dan mengirim data melalui sistem terintegrasi. Mereka juga mengedukasi keluarga almarhum tentang pentingnya mengurus akta kematian serta mengarahkan mereka kepada PRG. Sementara itu, AKP Rahmat, Kepala Satuan Reskrim Polres Aceh Tamiang, menyebutkan prosedur standar untuk melaporkan kematian tidak wajar kepada Disdukcapil, yang membantu penegakan hukum sekaligus memperkuat administrasi kependudukan. Koordinasi ini sangat efektif untuk memastikan data kematian yang akurat dan komprehensif.

3.3.6 Peningkatan Insentif dan Kesejahteraan PRG

Disdukcapil Kabupaten Aceh Tamiang telah mengambil langkah strategis untuk mengatasi kendala motivasi dan kinerja Petugas Registrasi Gampong (PRG) yang disebabkan oleh keterbatasan anggaran. Kepala Dinas, Ir. ADI DARMA, M.Si, menyampaikan bahwa untuk tahun anggaran 2025, honorarium PRG telah dinaikkan dari Rp 1.200.000 menjadi Rp 1.800.000 per bulan. Meskipun nominal ini masih di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP) Aceh, kenaikan tersebut diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan kinerja PRG. Selain itu, anggaran juga dialokasikan untuk tunjangan transportasi sebesar Rp 300.000 per bulan, khususnya untuk PRG yang bertugas di wilayah pelosok guna meringankan beban operasional mereka.

Sekretaris Dinas, Ibu Astrid Meliana, S.AP, MM, menambahkan bahwa Disdukcapil juga mengembangkan sistem reward and punishment untuk meningkatkan kinerja PRG. PRG dengan prestasi terbaik akan memperoleh bonus triwulanan sebesar Rp 1.500.000. Selain insentif finansial, PRG berprestasi mendapatkan kesempatan mengikuti pelatihan dan studi banding ke daerah lain yang sukses dalam pengelolaan administrasi kependudukan. Upaya lain yang sedang diusulkan adalah pembukaan formasi khusus

Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari jalur PRG, sehingga mereka yang berprestasi berpeluang untuk menjadi PNS.

Respon dari PRG menunjukkan bahwa upaya ini cukup diapresiasi. Bapak Teuku Irfan dari Desa Medang Ara menyatakan bahwa kenaikan honorarium dan tunjangan transportasi sangat membantu kesejahteraan mereka meskipun belum sepenuhnya sebanding dengan beban kerja. Sistem reward juga memotivasi mereka untuk bekerja lebih optimal, dan beliau sendiri pernah menerima bonus triwulanan atas pencapaian target penerbitan akta kematian tertinggi di kecamatannya. Ibu Fatimah dari Desa Johar menambahkan bahwa adanya peluang diangkat menjadi PNS melalui formasi khusus memberikan harapan karir yang jelas dan menjadi motivasi tambahan untuk terus meningkatkan kompetensi dan kinerja, sementara pelatihan dan studi banding sangat berguna untuk pengembangan diri.

3.4 Analisis Efektivitas Petugas Registrasi Gampong Dalam Penerbitan Akta Kematian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, analisis efektivitas Petugas Registrasi Gampong dalam penerbitan akta kematian di Kabupaten Aceh Tamiang, khususnya di Kecamatan Karang Baru, dapat dijelaskan sebagai berikut:

3.4.1 Analisis Dimensi Pencapaian Tujuan

Dimensi pencapaian tujuan dalam pelayanan pencatatan akta kematian yang dievaluasi melalui tiga indikator menunjukkan hasil yang cukup positif. Pertama, dari segi jumlah akta kematian yang diterbitkan, terjadi peningkatan signifikan sejak diberlakukannya sistem PRG, dengan capaian sebanyak 248 akta kematian di Kecamatan Karang Baru pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan PRG berhasil memperluas jangkauan layanan pencatatan kematian hingga ke tingkat gampong. Kedua, dari segi kesesuaian dengan target waktu penerbitan, PRG berhasil mempersingkat rata-rata waktu penerbitan akta kematian menjadi 1-2 hari kerja, lebih cepat dari standar yang ditetapkan dalam Permendagri yakni 3 hari kerja. Pencapaian ini menunjukkan efisiensi pelayanan yang baik dari PRG. Ketiga, dari segi tingkat keberhasilan penerbitan akta kematian, capaian sebesar 89,9% mencerminkan tingkat efektivitas yang cukup tinggi. Namun demikian, angka ini masih perlu ditingkatkan untuk mencapai target ideal 100%, karena masih terdapat sekitar 10,1% peristiwa kematian yang belum tercatat dan belum dibuatkan akta kematian.

3.4.2 Analisis Dimensi Integrasi

Dimensi integrasi yang dievaluasi melalui aspek koordinasi dan komunikasi menunjukkan hasil yang cukup baik. Koordinasi antara Petugas Registrasi Gampong (PRG) dengan Disdukcapil, antar sesama PRG, serta dengan keluarga almarhum berjalan secara efektif. Hal ini didukung oleh sistem komunikasi yang terstruktur, seperti pertemuan koordinasi rutin, grup WhatsApp, dan forum diskusi PRG yang memfasilitasi pertukaran informasi dan penyelesaian masalah secara cepat. Dari segi komunikasi, PRG juga telah menunjukkan kemampuan yang baik dalam berinteraksi dengan masyarakat. Hal ini tercermin dari penilaian positif masyarakat yang menilai bahwa PRG mampu memberikan penjelasan yang jelas dan mudah dipahami. Selain itu, keterbukaan informasi dan kemudahan akses informasi juga tergolong memadai, ditunjukkan dengan keberadaan

banner atau pengumuman di kantor gampong serta nomor kontak PRG yang mudah dijangkau oleh masyarakat.

3.4.3 Analisis Dimensi Adaptasi

Dimensi adaptasi yang dievaluasi melalui peningkatan kemampuan dan penyesuaian program menunjukkan hasil yang cukup beragam. Sebagian besar Petugas Registrasi Gampong (PRG) telah memiliki pemahaman yang baik mengenai prosedur dan persyaratan pengurusan akta kematian, berkat pelatihan intensif yang diselenggarakan oleh Disdukcapil. Namun, masih terdapat kesenjangan dalam kemampuan penggunaan teknologi, di mana sekitar 30% PRG membutuhkan pendampingan yang lebih intensif agar dapat mengoperasikan aplikasi dan sistem secara optimal. Dari segi penyesuaian program, PRG telah menunjukkan fleksibilitas yang baik dalam memberikan pelayanan, misalnya dengan melakukan pelayanan jemput bola bagi keluarga yang tidak mampu atau lansia. Selain itu, PRG juga cukup inovatif dalam mengembangkan metode sosialisasi dan pelayanan yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat setempat, sehingga pelayanan dapat berjalan lebih efektif dan responsif.

3.4.4 Analisis Faktor Penghambat

Berdasarkan hasil penelitian, faktor-faktor penghambat efektivitas Petugas Registrasi Gampong (PRG) dalam penerbitan akta kematian di Kabupaten Aceh Tamiang dapat dikelompokkan menjadi lima kategori utama. Pertama, keterbatasan infrastruktur teknologi, di mana jaringan internet yang tidak stabil serta keterbatasan perangkat komputer di beberapa gampong menjadi kendala utama dalam pelaksanaan aplikasi Kios Tersipu. Kedua, keterbatasan sumber daya manusia, dengan jumlah PRG yang belum ideal—hanya satu PRG di 21 dari 31 gampong di Kecamatan Karang Baru—serta dominasi kualifikasi pendidikan lulusan SMA, yang menjadi tantangan dalam pelaksanaan tugas PRG. Ketiga, kesadaran masyarakat yang masih rendah, di mana masih ada persepsi bahwa pengurusan akta kematian tidak terlalu penting atau hanya diperlukan jika ada kepentingan tertentu, sehingga menyulitkan PRG dalam meningkatkan cakupan pencatatan kematian. Keempat, kendala geografis, terutama kondisi wilayah yang sulit dijangkau, terutama pada musim hujan, yang menghambat PRG dalam menjangkau seluruh penduduk. Kelima, keterbatasan anggaran, seperti honorarium PRG yang masih rendah sebesar Rp 1.200.000 per bulan dan keterbatasan dana untuk pengadaan sarana pendukung, yang menjadi hambatan dalam optimalisasi peran PRG.

3.4.5 Analisis Upaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Upaya yang telah dilakukan Disdukcapil Kabupaten Aceh Tamiang dalam mengatasi hambatan yang dihadapi oleh PRG dapat dinilai cukup komprehensif dan terarah. Dari sisi infrastruktur teknologi, Disdukcapil telah melakukan pengadaan komputer, menjalin kerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) untuk penguatan jaringan internet, serta mengembangkan versi offline aplikasi Kios Tersipu guna mengatasi kendala akses jaringan. Dalam hal peningkatan kapasitas sumber daya manusia, Disdukcapil rutin mengadakan pelatihan, menerapkan sistem mentoring, serta mengembangkan modul dan video tutorial untuk mendukung peningkatan kualitas PRG. Sosialisasi dan edukasi masyarakat juga dijalankan secara intensif melalui berbagai media dan melibatkan tokoh masyarakat guna meningkatkan kesadaran pentingnya akta

kematian. Selain itu, inovasi layanan seperti SIDALING dan PRG Mobile menunjukkan kreativitas Disdukcapil dalam mengatasi kendala geografis serta memperluas jangkauan pelayanan ke wilayah pelosok. Penguatan koordinasi antar lembaga terkait dan peningkatan insentif bagi PRG menjadi langkah strategis lain yang memperkuat efektivitas kinerja PRG secara keseluruhan.

3.5 Diskusi Temuan Utama

Temuan Penelitian ini mengungkapkan bahwa Petugas Registrasi Gampong (PRG) di Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, memainkan peran penting dalam penerbitan akta kematian. Selama tahun 2020, PRG berkontribusi terhadap penerbitan 248 dari total 2.116 akta kematian yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tamiang, atau sekitar 11,7%. Temuan ini sejalan dengan penelitian Mahira dan Safrida (2023) yang menunjukkan bahwa inovasi pelayanan oleh PRG di Kabupaten Aceh Barat meningkatkan kepuasan masyarakat dan mempercepat proses administrasi kependudukan. Inovasi ini melibatkan penyederhanaan proses pelayanan dan penggunaan teknologi untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan. Namun, berbeda dengan temuan Lubis dan Nurhadi (2019) di Kabupaten Bulukumba, yang menemukan bahwa efektivitas pelayanan akta kematian masih terhambat oleh kurangnya sosialisasi dan keterbatasan sumber daya aparatur. Penelitian ini menunjukkan bahwa di Karang Baru, tantangan utama adalah keterbatasan infrastruktur dan teknologi, yang mempengaruhi kinerja PRG dalam melaksanakan tugasnya. Temuan ini juga diperkuat oleh penelitian Prasetyo dan Hamudy (2016) yang menyoroti bahwa meskipun telah ada regulasi terkait pencatatan kelahiran dan kematian di Indonesia, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan, seperti birokrasi yang berbelit dan kurangnya sumber daya manusia yang memadai di tingkat desa. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas PRG dalam penerbitan akta kematian sangat dipengaruhi oleh integrasi lintas lembaga, adaptasi terhadap teknologi, serta dukungan sosial dan anggaran. Ini menunjukkan pentingnya pendekatan kontekstual dalam menilai efektivitas layanan publik di tingkat desa

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian, efektivitas Petugas Registrasi Gampong (PRG) dalam penerbitan akta kematian di Kabupaten Aceh Tamiang cukup baik, terlihat dari peningkatan jumlah akta kematian dan waktu penerbitan yang lebih cepat. Namun, kendala utama meliputi keterbatasan teknologi, SDM, kesadaran masyarakat, kondisi geografis, dan anggaran. Untuk mengatasi hal ini, Disdukcapil telah melakukan pengadaan komputer, penguatan jaringan, pelatihan PRG, sosialisasi masyarakat, inovasi layanan seperti SIDALING dan PRG Mobile, koordinasi dengan instansi terkait, serta peningkatan insentif dan sistem reward bagi PRG. **Keterbatasan penelitian** Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, data yang digunakan sebagian besar bersumber dari wawancara dan observasi di Kecamatan Karang Baru, sehingga hasilnya mungkin kurang mewakili kondisi di kecamatan lain di Kabupaten Aceh Tamiang. Kedua, penelitian ini lebih menitikberatkan pada aspek operasional PRG tanpa mendalami faktor psikologis atau sosial yang memengaruhi motivasi petugas dan kesadaran masyarakat secara menyeluruh. Ketiga, keterbatasan waktu dan sumber daya menyebabkan penelitian belum dapat mengevaluasi dampak jangka panjang dari program yang dijalankan. Ke

depan, penelitian lebih komprehensif dengan cakupan wilayah yang lebih luas dan metode yang beragam sangat diperlukan untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap dan akurat. **Arah masa depan penelitian** Penelitian selanjutnya dapat fokus pada pengembangan teknologi informasi yang lebih mudah digunakan, terutama aplikasi offline untuk wilayah terpencil. Selain itu, perlu dikaji lebih dalam faktor motivasi dan pengaruh insentif terhadap kinerja PRG. Studi tentang strategi sosialisasi yang efektif dengan melibatkan tokoh masyarakat dan media sosial juga penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Penelitian mengenai penguatan koordinasi antarinstansi dan evaluasi regulasi daerah yang mendukung peran PRG juga perlu dilakukan. Dengan fokus ini, diharapkan penelitian masa depan dapat membantu meningkatkan efektivitas layanan administrasi kependudukan di tingkat gampong.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Saya mengucapkan terima kasih kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tamiang, beserta seluruh informan yang telah memberikan data dan informasi berharga untuk penelitian ini. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada dosen pembimbing dan civitas akademika Institut Pemerintahan Dalam Negeri atas bimbingan dan dukungannya selama proses penyusunan skripsi. Tak lupa, saya juga berterima kasih kepada keluarga dan rekan-rekan yang telah memberikan semangat dan motivasi hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Abouzahr, C., de Savigny, D., Mikkelsen, L., Setel, P. W., Lozano, R., & Lopez, A. D. (2015). Civil registration and vital statistics: Progress in the data revolution for counting and accountability. *Global Health Action*, 8(1), 27286. <https://doi.org/10.3402/gha.v8.27286>
- Arsyam, M., & M. Yusuf Tahir. (2021). Ragam Jenis Penelitian dan Perspektif. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 2(1), 37–47. <https://doi.org/10.55623/au.v2i1.17>
- Husnina, N. (2022). Peran Petugas Registrasi Penduduk Di Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar (Studi di Gampong Kajhu dan Gampong Cadek). Skripsi. Institut Pemerintahan Dalam Negeri. <https://repository.arraniry.ac.id/id/eprint/19847/>
- Leon, D. A., Rao, C., & Lopez, A. D. (2020). Mortality data in vital registration systems: Strengths and weaknesses. *BMC Public Health*, 20(1), 117. <https://doi.org/10.1186/s12889-020-08470-2>
- Lubis, B., & Nurhadi, A. I. (2019). Efektivitas Pelayanan Akta Kematian dalam Tertib Administrasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Kependudukan dan Catatan Sipil*, 7(2), 91–98. <http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/543/1/JURNAL%20BU%20BERTHA-converted.pdf>
- Mahira, A., & Safrida, S. (2023). Analisis Inovasi Petugas Registrasi Gampong dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan di Kabupaten Aceh Barat. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 9(1). <https://jurnal.unigal.ac.id/dinamika/article/view/6645>
- Prabowo, H. (2022). Transformasi Birokrasi Pemerintahan Menuju Pelayanan Publik

- Digital. Pidato Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri dalam Sidang Senat Terbuka Dies Natalis ke-65 IPDN. Jatinangor: IPDN Press. <https://www.balebandung.com/rektor-ipdn-transformasi-pemerintahan-digital-jadi-tuntutan-perkembangan-global>
- Prasetyo, H., & Hamudy, M. I. A. (2016). Increasing the Scope of Birth and Death Registration: Issues and Challenges. *Jurnal Bina Praja*, 8(1), 13–26. <https://doi.org/10.21787/jbp.08.2016.13-26>
- Rahma, D., Ikhsan, I., & Fadhly, Z. (2023). Evaluasi Kinerja Petugas Registrasi Gampong dalam Pengurusan Akta Kelahiran dan Akta Kematian di Kabupaten Aceh Barat. *Jurnal Pemerintahan Daerah dan Desa*, 5(1), 45–58. <https://jurnal.uns.ac.id/spirit-publik/article/view/64722>
- Ripa'i, A. (2018). Strategi implementasi sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK). *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 8(1), 35–45. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/JAP/article/view/20318>
- Sari, N. R. D. I., & Meirinawati. (2023). Inovasi Pelayanan “Si Jaran Ijo” di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Pelayanan Publik*, 11(2), 133–141. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/download/46897/39351/85694>
- Setel, P. W., Macfarlane, S. B., Szreter, S., Mikkelsen, L., Jha, P., Stout, S., & AbouZahr, C. (2007). A scandal of invisibility: Making everyone count by counting everyone. *The Lancet*, 370(9598), 1569–1577. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(07\)61307-5](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(07)61307-5)
- Sururama, R., & Permana, A. F. B. (2021). Pelayanan administrasi Kartu Identitas Anak (KIA) secara online di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Jawa Tengah. *Jurnal Media Birokrasi*, 64–79. <https://doi.org/10.33.701/jmb.v3i2.2478>
- Syahrial, M., & Lestari, R. (2021). Evaluasi Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan Berbasis Desa di Kabupaten Garut. *Jurnal Ilmu Pemerintahan: Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah (IPDN)*, 6(1), 1–15. <http://eprints2.ipdn.ac.id/view/subjects/H1.type.html>
- Wahyudi, A., & Permana, A. (2020). Sinergitas Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Desa dalam Pelaksanaan Program Petugas Registrasi Gampong. *Jurnal Bina Praja (IPDN)*, 12(2), 201–212. <http://eprints2.ipdn.ac.id/view/subjects/H1.type.html>